

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk membantu terwujudnya pelaksanaan pemerintah daerah yang mandiri atau sering kita sebut otonomi daerah sangat akan bergantung pada siap atau tidaknya pemerintah daerah dalam mengelola sistem pemerintahannya agar terwujudnya pembangunan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan dan juga mendapat partisipasi dari masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendahan di banding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Sebagai pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah secara penuh, untuk melaksanakan pemerintahannya, maka pemerintah desa

diharuskan untuk mencari mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam penyelenggaraan otonomi daerah dirasakan perlu agar menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) untuk mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang baik diperlukan sebuah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam hal ini pemerintah mengeluarkan sebuah inovasi untuk mendukung asas akuntabel dan transparan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, desa-desa di Indonesia mencari serta memanfaatkan aplikasi keuangan desa dari beraneka pengembang aplikasi (*developer*). Pada akhir 2015 lalu, Kementerian Dalam Negeri bersepakat dengan BPKP untuk menyosialisasikan aplikasi besutan BPKP, yang diberi label SIMDA sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perkembangannya, SIMDA berrganti nama menjadi Siskeudes dan mulai diperkenalkann ke desa-desa di Indonesia.

Adanya Siskuedes merupakan langkah baru pemerintah untuk menghadapi kemajuan teknologi dan mencoba menutupi celah yang selama ini sering terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam

pelaporan keuangan. Sehingga penerapan Siskeudes ini menjadi solusi yang ditawarkan untuk selangkah lebih maju dalam menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penerapan Siskeudes di Kabupaten Sukabumi mulai diterapkan pada tahun 2016 namun pada saat itu hanya tiga Desa yang sudah berjalan yaitu Desa Karang Papak, Desa Bojong Kaler, dan Desa Citanglar. Pada tahun 2017 penerapan Siskeudes di Kabupaten Sukabumi sudah menyentuh angka 70% namun ada beberapa Desa yang masih perlu bimbingan dalam melaksanakan Siskeudes ini, Di Kecamatan Surade itu sendiri Desa yang baru melaksanakan siskeudes sekitar 50%. Pada tahun 2018 di Kecamatan Surade Siskeudes sudah hampir berjalan sepenuhnya yaitu sekitar 90% namun ada beberapa Desa yang masih belum berjalan yaitu Desa Sirnasari, Desa Cipeundeuy, dan Desa Warnasari.

Sebagai salah satu Kecamatan yang berada di daerah pelosok, Kecamatan Surade membutuhkan perhatian khusus, perhatian dalam pengawasan maupun dari segi bimbingan. Sebagian desa yang ada dalam ruang lingkup Kecamatan Surade memiliki masalah yang sama dalam pengawasan dan bimbingan maka dari itu penerapan Siskeudes menjadi tantangan yang sulit bagi beberapa desa. Masih ada beberapa desa dalam ruang lingkup Kecamatan Surade yang masih terkendala dalam penerapan Siskeudes ini, bahkan ada beberapa desa yang belum

bisa menerapkan sama sekali dan beberapa masih dalam tahap bimbingan Desa lain.

Setelah peneliti melakukan observasi awal yang dilakukan tanggal 6 Oktober 2018 mengenai implementasi Siskeudes dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait, maka terdapat beberapa fenomena di Desa Cipeundeuy, Desa tersebut merupakan salah satu dari tiga Desa yang belum bisa menerapkan siskeudes sampai saat ini diakibatkan beberapa faktor yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dalam hal ini jaringan internet belum bisa menjangkau desa tersebut, sumber daya manusia yang belum memahami cara pengaplikasian siskeudes itu sendiri, kurangnya komunikasi antara staf dan kepala desa, kurangnya pengawasan dari kepala desa diakibatkan kepala desa yang sering berada diluar kantor.

Sedangkan jika dilihat dari Rencana Kerja Pertahun (RKP) Desa Cipeundeuy tahun 2017, Desa Cipeundeuy telah menjalankan peningkatan kapasitas aparatur desa serta terdapat kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa yang di dalamnya terdapat bimtek mengenai Siskeudes yang dilakukan secara bersama-sama dengan desa lain dengan kata lain seharusnya sumber daya manusia di Desa Cipeundeuy sudah terlatih dan paham mengenai bagaimana cara mengimplementasikan Siskeudes itu sendiri.

Tabel 1.1

Rencana Kegiatan Pertahun Desa Cipeundeuy tahun 2017

Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Cipeundeuy	1	Kali	5.000.000	1 Tahun	01-Jan-17	31-Des-17
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Cipeundeuy	11	Orang	10.000.000	1 Tahun	01-Jan-17	31-Des-17
	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Cipeundeuy	7	Orang	5.000.000	1 Tahun	01-Jan-17	31-Des-17

Penelitian mengenai implementasi kebijakan telah banyak digunakan namun penelitian mengenai implementasi kebijakan Siskeudes masih jarang ditemui, hal ini dikarenakan program Siskeudes merupakan sebuah program baru yang digagas pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Beberapa fenomena yang ditemukan peneliti saat melakukan observasi awal tersebut di atas mengindikasikan bahwa penerapan siskeudes di Desa Cipeundeuy belum berjalan dengan maksimal bahkan masih bisa dikatakan belum menerapkan sama sekali siskeudes padahal pelaporan melalui siskeudes ini sangat penting untuk mencairkan APBDes selanjutnya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi

pembangunan di desa tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi”**

B. Fokus Masalah

Melihat fenomena diatas peneliti memfokuskan untuk meneliti proses implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Cipeundeuy.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah **“Bagaimana Implementasi Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Cipeundeuy”**

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Cipeundeuy ?

E. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat :

1. Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
- b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Siskeudes di Desa Cipeundeuy.

2. Praktis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan tentang masalah dalam implementasi kebijakan penggunaan Siskeudes di Desa Cipeundeuy.
- b. Manfaat yang didapat oleh pihak pemerintah Desa Cipeundeuy ialah mengetahui permasalahan dalam implementasi kebijakan penggunaan Siskeudes di Desa Cipeundeuy.
- c. Manfaat bagi masyarakat adalah membangun kesadaran bahwa pelaporan keuangan desa melalui siskeudes ini sangat penting karena akan berhubungan dengan proses pembangunan daerah itu sendiri.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Nicholas Henry dalam Maksudi (2017:225) mengemukakan *“Public Administration is a broad-ranging and amorphous combination of theory and practice its purpose is to promote a superior*

understanding of government and its relationship with the society, it governs, as well as to encourage public policies more responsive to social needs and to institute managerial practices attuned to effectiveness, efficiency and the deeper human requisites of the citizenry". (Administrasi publik merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi negara dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah :

"...setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan."(Nugroho,2014:129)

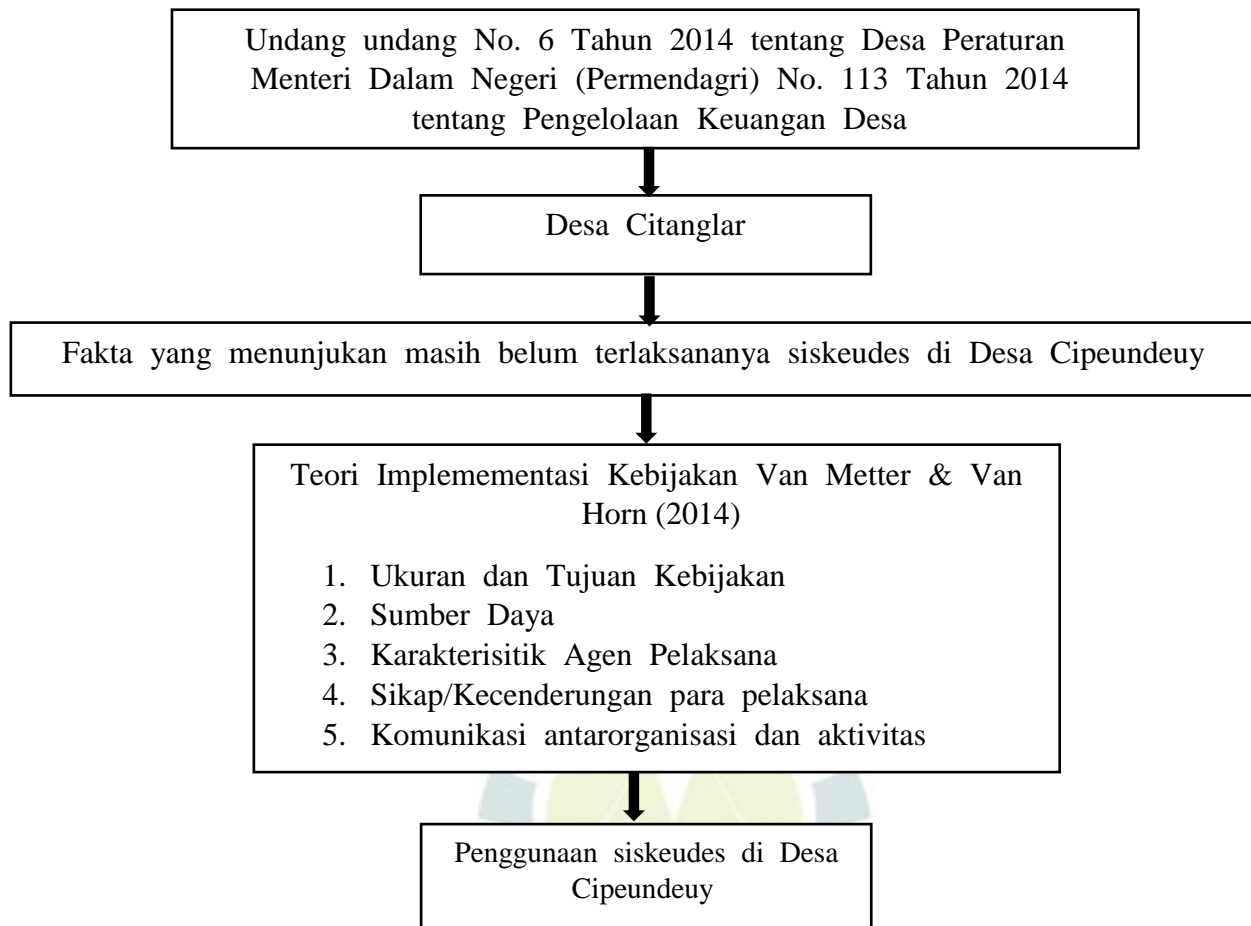
Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam (Agustino, 2014:141) disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung

dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah :

- 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana
- 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana
- 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Cipeundeuy Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi” memiliki proposisi yaitu penggunaan SISKEUDES akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melancarkan pembangunan di desa itu. Tetapi hal tersebut tergantung pada implementasi yang ditentukan oleh ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap, komunikasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG